

# WARTA

## Kebijakan Iptek & Manajemen Litbang

- Nani Grace** Pola Interaksi Antara Perguruan Tinggi - Pemerintah - Industri :  
*Kajian Triple Helix*
- Hadi Kardoyo** Proses Inovasi Di Industri Informasi : Sebuah Pembelajaran bagi  
Indonesia
- Amir Asyikin Hasibuan** Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Transaksional dan  
Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan
- Agus Santoso** Membangun Kemampuan Teknologi Nasional di Sektor Migas :  
Suatu Tinjauan Analisis Kebijakan
- Hartiningasih** Pembentukan "Inkubator" di UPT BPPTK - LIPI : Strategi  
Mendorong Pemanfaatan Hasil Litbang
- Radot Manalu** Pendayagunaan *E-Government* untuk Mendukung Pemerintahan  
yang Baik (*Good Governance*) pada Institusi Pemerintah Daerah

Warta Kebijakan Iptek & Manajemen Litbang	Vol. 7	No. 1	Hlm. 1-100	Jakarta, Juli 2009	ISSN : 1907-9753	Terakreditasi sebagai Majalah Ilmiah berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.536/D/2007 Tanggal 26 Juni 2007
---	--------	-------	---------------	-----------------------	---------------------	--



**PAPPITEK-LIPI**

**Pusat Penelitian Perkembangan Iptek**

**Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia**

# WARTA

## Kebijakan Iptek & Manajemen Litbang

---

### SUSUNAN REDAKSI

- Penanggung Jawab : Kepala Pusat Penelitian Perkembangan Iptek -  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PAPPIPTEK - LIPI)
- Ketua Dewan Redaksi : Dr.Amir Asyikin Hasibuan, MS (PAPPIPTEK - LIPI)
- Anggota Dewan Redaksi : Drs.Azis Taba Pabeta, MS (PAPPIPTEK - LIPI)  
Ir.M.Arifin, MM (PAPPIPTEK - LIPI)  
Dra.Wati Hermawati, MBA (PAPPIPTEK - LIPI)  
Ir.Dudi Hidayat, M.Sc (PAPPIPTEK - LIPI)
- Mitra Bestari (*Peer Group*) : Prof.Dr.Martani Huscini (Departemen Kelautan dan Perikanan)  
Prof.Dr.E.Gumbira Said (IPB)  
Prof.Dr.Masbach R.Tagore Siregar (Pusit Fisika - LIPI)  
Dr.Tatang Taufik, M.Sc (BPPT)  
Dr. Amru Hydari Nazif (LIPI)  
Drs.Nazir Harjanto, MA (Universitas Budi Luhur)  
Ir.Akhmadi Abbas, M.Eng.Sc (UPT B2P TTG - LIPI)  
Drs.Manaek Simamora, MBA (Puslit Inovasi - LIPI)
- Sekretaris Redaksi : Vetti Rina Prasetyas, SH (PAPPIPTEK - LIPI)
- Tata Usaha : Endang Mardiningsih, A.Md (PAPPIPTEK - LIPI)
- Layout : Warkim Ikwansyah, S.Kom

**Alamat Redaksi :**  
**Pusat Penelitian Perkembangan Iptek - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia**  
**(PAPPIPTEK - LIPI)**  
Gedung Widya Graha LIPI Lt.8  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta 12710  
Telepon : (021) 5201602, (021) 5225206, (021) 5251542, ext. 704  
Faximile : (021) 5201602

# WARTA

## Kebijakan Iptek & Manajemen Litbang

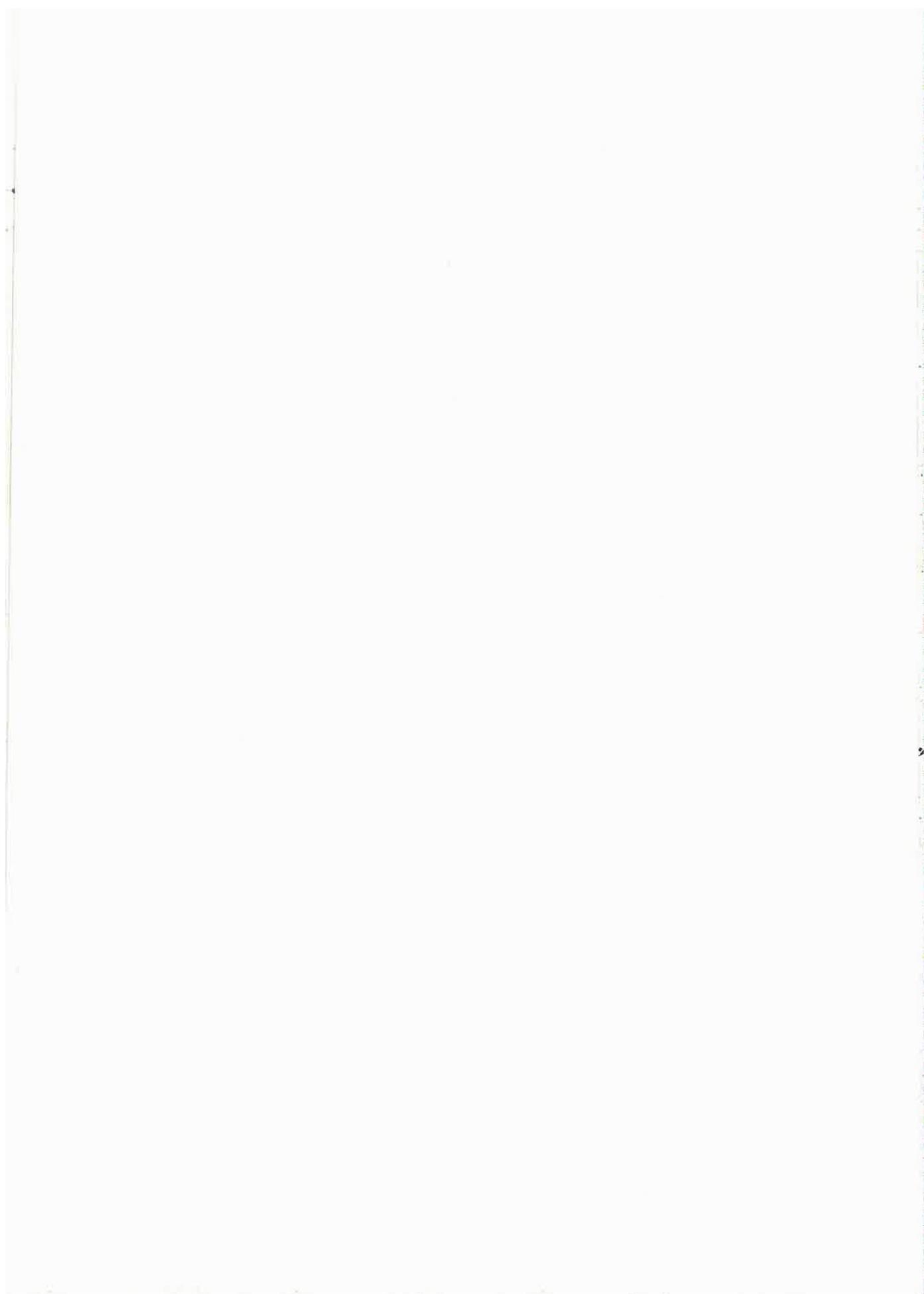
Vol. 7 No.1, Juli 2008

ISSN : 1907-9753

No:76/AKRED-LIPI/P2MBI/5/2007

- Pola Interaksi Antara Perguruan Tinggi - Pemerintah - Industri :  
Kajian *Triple Helix*  
Oleh : Nani Grace ..... 1-14
- Proses Inovasi Di Industri Informasi : Sebuah Pembelajaran bagi Indonesia  
Oleh : Hadi Kardoyo ..... 15-28
- Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional  
Terhadap Kinerja Karyawan  
Oleh : Amir Asyikin Hasibuan ..... 29-44
- Membangun Kemampuan Teknologi Nasional di Sektor Migas :  
Suatu Tinjauan Analisis Kebijakan  
Oleh : Agus Santoso ..... 45-58
- Pembentukan "Inkubator" di UPT BPPTK - LIPI : Strategi Mendorong  
Pemanfaatan Hasil Litbang  
Oleh : Hartiningsih ..... 59-80
- Pendayagunaan *E-Government* untuk Mendukung Pemerintahan  
yang Baik (*Good Governance*) pada Institusi Pemerintah Daerah  
Oleh : Radot Manalu..... 81-100

Berdasarkan SK No. 536/D/2007 Tanggal 26 Juni 2007  
Warta Kebijakan Iptek dan Manajemen Litbang telah Terakreditasi C



## KATA PENGANTAR

Warta Kebijakan Iptek dan Manajemen Litbang ini merupakan media ilmiah yang mengetengahkan hasil-hasil penelitian atau makalah ilmiah yang aktual, relevan dan dibutuhkan masyarakat dalam bidang Kebijakan Iptek dan Manajemen Litbang. Atas dasar berpikir tersebut, kajian-kajian ilmiah yang dikirim oleh para penulis ke Warta Kebijakan Iptek dan Manajemen Litbang akan disaring sesuai dengan relevansinya dan kualitas intelektualnya dalam menyusun karya ilmiah tersebut.

Pada penerbitan kali ini, akan disajikan beberapa kajian ilmiah sebagai berikut : Pola Interaksi antara Perguruan Tinggi-Pemerintah-Industri : Kajian *Triple Helix*; Proses Inovasi di Industri Informasi : Sebuah Pembelajaran bagi Indonesia; Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Transaksional dan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan; Membangun Kemampuan Teknologi Nasional di Sektor Migas : Suatu Tinjauan Analisis Kebijakan; Pembentukan "Inkubator" di UPT BPPTK – LIPI : Strategi Mendorong Pemanfaatan Hasil Litbang; Pendayagunaan *E-Government* untuk Mendukung Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) pada Institusi Pemerintah Daerah.

Tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi kalangan masyarakat ilmiah, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai betapa pentingnya peran serta Iptek dalam mendorong kemajuan bangsa.

Akhirnya untuk perbaikan mutu terbitan Warta Kebijakan Iptek dan Manajemen Litbang yang akan datang, saran dan kritik dari pembaca sangat kami harapkan.

Jakarta, Juli 2009

Dewan Redaksi



## PENDAYAGUNAAN E-GOVERNMENT UNTUK MENDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) PADA INSTITUSI PEMERINTAH DAERAH

Radot Manalu\*

### Abstract

*The progress of Science and Technology, in some countries has forced government to use Information Technology (IT) as means of public service (e-Government) that can produce transparency, accountability, equity, effectiveness, and enhance the participation of the community. Transparency is an important element in the development of e-Government of a modern government. Service system with e-Government is intended to support the creation of good governance that is reflected from the clean, transparency and accountable government. At present, both National Government and Regional Government have not used e-Government optimally. In general, the used of e-Government in Indonesia is limited only on website usage for providing information to the public. Utilization of e-Government is very limited specially for regional government, however it certainly should be accordance to the organization's culture and conditions of their respective regions.*

*Keywords : e-government, good governance, regional government*

### 1. Pendahuluan

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) telah semakin luas khususnya penggunaan Teknologi Informasi (TI). Penggunaan TI ini tidak lagi terbatas pada bidang-bidang tertentu, melainkan juga telah meluas pada bidang-bidang lain seperti bidang penelitian dan pengembangan (litbang), pendidikan, pertahanan dan keamanan, sosial, perdagangan, dan sebagainya. Pendayagunaan TI semakin menjanjikan efisiensi karena dapat mempercepat penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh sebab itu TI telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang

kehidupan manusia bahkan di tingkat rumah tangga. Dengan adanya manfaat dan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan TI ini maka teknologi informasi ini juga telah diterapkan dalam praktek pemerintahan di beberapa negara. Demikian juga dalam penyelenggaraan pemerintahan TI telah menjadi suatu pilihan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada saat ini, di beberapa pemerintahan daerah di Indonesia telah dibangun *e-Government* dan telah memiliki TI berupa situs *website*, akan tetapi belum didayagunakan secara optimal dalam pelayanan publik untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perkembangannya istilah Teknologi Informasi (TI), Teknologi Informasi

---

\* Peneliti PAPPITPEK-LIPI

dan Komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) telah memunculkan istilah baru yang dikenal dengan *Electronic Government (e-Government)* kemudian *Technology Governmet (T-Government)*.

Dalam tulisan ini penulis membatasi pembahasan tentang *e-Government* sebagai aspek pendukung untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Rahardjo (2001), *e-Government* pada intinya adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Selain itu, menurut definisi *World Bank* (2004), *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga pemerintahan. Sedangkan menurut *EZ Gov*, pengertian *e-Government* adalah penyederhanaan praktek pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi jelaslah bahwa *e-Government* bertujuan untuk efisiensi karena bersifat penyederhanaan dalam praktek pemerintahan (Setiawati, 2009).

Seiring dengan kemajuan iptek, pada saat ini informasi telah memegang peranan penting dalam segenap kegiatan, apalagi dalam era baru yang disebut dengan era globalisasi ditandai dengan keterbukaan dan persaingan bebas. Dalam era globalisasi, perubahan-perubahan semakin cepat karena kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, adalah dua aspek utama yang

sangat berperan dalam era globalisasi. Namun, kedua aspek tersebut dapat menjadi peluang dalam penyelenggaraan pemerintahan kalau dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya justru keberadaan *e-Government* ini dapat menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan jika tidak mampu mengelola dengan baik.

Pendayagunaan *e-Government* juga sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah, dengan harapan agar penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas di sini dapat diperoleh karena otonomi daerah lebih menekankan pada kedekatan pemerintah untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pentingnya efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Efisiensi, efektifitas dan

transparansi ini merupakan unsur yang penting dalam pengembangan *e-Government*, sehingga *e-Government* sangat sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, untuk menghadapi era global ini Pemerintah Daerah dituntut untuk membangun ketangguhan disegala bidang. Disamping itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya tuntutan pembangunan dan pelayanan oleh masyarakat, menjadikan pemerintah daerah harus kreatif di segala bidang dan mampu memanfaatkan segenap potensi yang ada termasuk pendayagunaan *e-Government*.

Tulisan mengenai perkembangan TI sudah banyak dikaji oleh para peneliti atau ilmuwan maupun pemerhati, namun di sini penulis membatasi pada konsep *e-Government* dan bagaimana agar *e-Government* berupa situs *website* yang telah dimiliki oleh instansi Pemerintah daerah dapat didayagunakan secara optimal dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari terutama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Data dan informasi yang digunakan dalam tulisan ini hanya terbatas dengan data sekunder, karena penulis tidak melakukan survey ke lapangan. Data dan informasi tersebut, diperoleh dari berbagai literatur yaitu: jurnal,

makalah, laporan penelitian, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga menggunakan *website* melalui internet untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan. Berdasarkan data dan informasi tersebut, penulis berupaya untuk menjelaskan pentingnya pendayagunaan *e-Government*, kondisi *e-Government*, hambatan pendayagunaan *e-Government* pada instansi pemerintah di Indonesia dan strategi pendayagunaan *e-Government* untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya pada Pemerintahan Daerah.

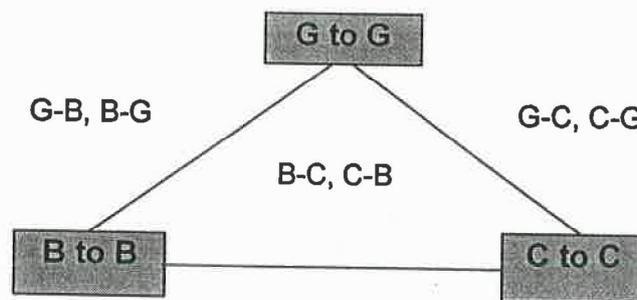
## 2. Karakteristik *E-Government* dan *Good Governance*

Berdasarkan definisi dari *World Bank*, *e-Government* adalah penggunaan TI oleh Pemerintah yang memungkinkan untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan (Windraty, 2005). Secara ringkas tujuan implementasi *e-Government* adalah untuk menciptakan *customer online*.

Penggunaan TI ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah. *E-Government* juga dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan Pemerintah. *E-Government* merupakan system TI yang dikembangkan oleh Pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakat, untuk bisa mendapatkan kemudahan

akses informasi dan layanan pemerintah. Selain itu, *e-Government* merupakan bentuk pemanfaatan TI untuk mendukung aktivitas Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas internal maupun di lingkungan Pemerintah Daerah serta aktivitas pelayanan publik. Transparansi merupakan unsur penting untuk pengembangan *e-Government* karena mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang menjadi tanggungjawab dari aparatur negara. Pendayagunaan *e-Government* bertujuan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Disamping itu, *e-Government* diharapkan dapat mendukung perbaikan produktivitas dan efisiensi dalam instansi pemerintahan maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Secara sederhana konsep *e-Government* diperlihatkan pada Gambar: 1 dibawah ini.



Sumber: *e-Government* Indonesia, diakses dari [www.goechi.com/egovernment.html](http://www.goechi.com/egovernment.html), tanggal 19/3/2009

Gambar: 1  
Model *E-Government*

Catatan : G : Government/Pemerintah  
B : Business/Swasta  
C : Community/Masyarakat

Gambar di atas memperlihatkan konsep *e-Government* dengan model *e-Business* yaitu: *B to B (Business to Business)*, *B to C (Business to Customer)*, *C to C (Customer to Customer)*, dan *C to B (Customer to Business)*. Pengertian dari konsep *e-Government* tidak terbatas pada pengertian yang telah disebutkan di atas, karena masing-masing negara yang menerapkan konsep *e-Government* ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan negara itu sendiri.

Istilah *good governance* mulai muncul di Indonesia sejak tahun 1990-an dan semakin mengemuka pada tahun 1996 seiring dengan interaksi pemerintah dengan negara-negara luar beserta lembaga-lembaga pemberi bantuan yang semakin menyoroti kondisi obyektif perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia. Lembaga-lembaga pemberi donor baik yang bersifat multilateral maupun bilateral mengaitkan penerapan *good governance* dengan kebijakan pemberian bantuan. *Good governance* dijadikan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian bantuan baik berupa pinjaman (*loan*) maupun hibah (*grant*).

*Governance* merupakan tata pemerintahan, *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik. Ada tiga komponen yang terlibat dalam *governance*, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling kontrol untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh salah satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu

komponen lebih tinggi dari komponen yang lain, maka akan terjadi dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

Menurut Bintoro, *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Lebih jauh, Bintoro menyatakan Pemerintah menjadi agen perubahan (*agent of change*) dari suatu masyarakat dalam negara berkembang. Selanjutnya, UNDP (1997) mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi untuk mengatur urusan-urusan negara, yang memiliki mekanisme, proses, hubungan, serta kelembagaan yang kompleks dimana warga negara dan berbagai kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak dan kewajiban mereka serta menengahi perbedaan yang ada di antara mereka (<http://www.mirror.undp.org/magnet/policy/cahapter1.htm,31/7/2009>). Selain itu, menurut Effendi (2000), istilah *good governance* juga diartikan sebagai pemerintahan yang baik (Domai, 2009).

*Good governance* melebihi ruang lingkup *e-Government*. *E-government* didefinisikan sebagai penyampaian layanan dan informasi dari Pemerintah kepada publik menggunakan sarana elektronik. *E-Government* memungkinkan warga negara berkomunikasi antar mereka maupun dengan pemerintah, dan ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, mengekspresikan kebutuhan nyata mereka tentang kesejahteraan dengan mengguna-

kan *e-Government* sebagai sarana. Pendayagunaan *e-Government*, merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam aktivitas Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas intern dalam satu lembaga maupun antar lembaga pemerintah serta aktivitas pelayanan publik.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, secara sederhana pemahaman mengenai *good governance* dapat dikatakan sebagai tata pemerintahan yang baik, dalam implementasinya tidak mudah untuk mengimplementasikan secara seragam. Namun demikian, pada hakekatnya keragaman makna tersebut memiliki kesamaan prinsip dan tujuan yakni terselenggaranya pemerintahan yang seimbang di antara semua komponen pelaku. Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya, ada ruang dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan diantara mereka. Dengan proses seperti ini diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

### 3. Tujuan dan Manfaat *e-Government*

Konsep *e-Government* diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan transparan. Hal ini diperlukan mengingat semakin dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat

menyesuaikan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem. Selain itu seperti telah disebutkan di atas, *e-Government* ditujukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang tercermin dari pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Dengan demikian transparansi merupakan unsur penting untuk penerapan *e-Government* dalam pemerintahan yang modern karena mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang merupakan tanggungjawab dari aparaturnegara.

Implementasi *e-Government* di instansi pemerintahan dapat membawa manfaat, antara lain :

- Pelayanan/*service* yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu pegawai kantor.
- Peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (*transparansi*) diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan perasaan saling curiga dan kesalahan dari semua pihak.
- Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk

dapat menentukan pilihannya misalnya data tentang sekolah, rumah sakit, dll.

- Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui *email* atau bahkan video konferensi. Bagi Indonesia yang memiliki area yang luas hal akan sangat membantu. Koordinasi, tanya jawab, diskusi antar pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa semuanya harus berada pada lokasi yang sama, tidak lagi harus berkumpul di satu tempat untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam.

Pendayagunaan *e-Government* bukan berarti menerapkan sistem pemerintahan secara elektronik saja atau dengan kata lain otomatisasi sistem, melainkan bertujuan lebih dalam dari itu. Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum pendayagunaan *e-Government*. *E-Government* memerlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan bersinergi dengan masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut.

Tidaklah mengherankan apa bila negara yang dapat

menjalankan *e-Government* sebagian besar adalah negara-negara maju karena dalam konteks *e-Government* seutuhnya bukanlah semata-mata hanya situs informasi. Hal tersebut dapat terjadi karena untuk membereskan sistem informasi dalam satu lembaga pemerintah saja sudah sangat sulit apalagi harus tercapainya sinergi dari sistem informasi dari berbagai lembaga-lembaga pemerintahan, karena hal ini berkaitan erat dengan faktor budaya, politik dan ekonomi suatu negara.

Beberapa negara telah membuktikan keberhasilan mereka dalam memanfaatkan *e-Government* untuk mendukung *good governance*. Banyak negara telah menggunakan internet sebagai sarana pelayanan publik yang menghasilkan transparansi, akuntabilitas, adil (*fair*), efektif, dan dapat mengakomodasi partisipasi seluruh warga masyarakat. Sebagai contoh penyelenggaraan *distance learning* melalui internet yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai negeri di Mexico dan Kanada merupakan contoh bagaimana TI digunakan dalam mendukung upaya *good governance* (Wigrantoro, 2004). Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh *Accenture* pada tahun 2001 negara yang telah menerapkan *e-Government* berdasarkan ranking secara berurutan, yaitu: Kanada, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Denmark, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Jerman, Irlandia, Belanda, Perancis, Norwegia, Selandia Baru, Spanyol, Belgia, Jepang, Portugal, Malaysia,

Italia, Afrika Selatan dan Meksiko (Setiawati, 2009).

Keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan *e-Government* bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan *on-line* akan tetapi lebih luas dari pada itu karena kinerja pada sektor publik juga akan berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Gupta & Jana (2003) berpendapat bahwa *e-Government* tidak lagi dilihat sebagai suatu pilihan, melainkan suatu keharusan bagi semua negara yang bertujuan untuk lebih baik dan lebih efisien (Dhilon, 2008). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendayagunaan *e-Government* ditujukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Pendayagunaan *e-Government* ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam administrasi pemerintahan dan dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pusat dan daerah.

Di era globalisasi, penerapan *e-Government* sangat penting karena telah memodernisasi pemerintahan publik di seluruh dunia dan juga hubungan antar pemerintah. Selain di Uni Eropa beberapa negara di Asia telah menggunakan *e-Government* untuk melaksanakan hubungan bilateral mereka. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan tujuan yang ingin dicapai mau tidak mau pemerintahan di Indonesia juga dituntut untuk menerapkan *e-Government*. Pada kondisi saat ini penggunaan *e-Government* sudah menjadi suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan

publik yang lebih baik untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk kepentingan hal itu pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan kesiapan penggunaan kemajuan teknologi telematika untuk mengimplementasikan *government on-line* secara efektif, serta mengintensifkan pendidikan dan pelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian pegawai pemerintahan di semua tingkatan.

#### 4. Hambatan Dalam Pendayagunaan *e-Government* di Pemerintahan Daerah

*E-Government* telah dimanfaatkan di organisasi swasta dan telah dapat dirasakan manfaatnya secara luas. Implementasi *e-Government* sebaiknya dilakukan oleh institusi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah untuk mendukung perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Implementasi *e-Government* sangat diinginkan dalam pemerintahan di Indonesia, namun banyak tantangan maupun hambatan dalam implementasinya.

Menurut Rahardjo (2001), ada beberapa hambatan dalam implementasi *e-Government* di Indonesia antara lain :

- Kultur berbagi (*sharing*) belum ada. Kultur berbagi (*sharing*) informasi dan mempermudah urusan belum membudaya di Indonesia
- Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan apa saja.
- Langkanya SDM yang handal.

Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya kurang memiliki SDM yang handal di bidang TI. Sedangkan SDM yang handal ini sebagian besar ada di lingkungan industri/bisnis.

- Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum tersebar secara merata. Terdapat di berbagai daerah masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik, walaupun ada harganya masih relatif mahal.
- Tempat akses yang terbatas. Jumlah tempat akses informasi masih sangat terbatas.

Disamping hambatan di atas, terdapat pemahaman yang kurang dari pihak Pemerintah Daerah mengenai esensi dan tujuan penerapan *e-Government* ini. Selain pendapat bahwa konsep *e-Government* ini sangat menguntungkan dan dapat mempermudah proses layanan pemerintah ke masyarakat, namun disisi lain masih ada yang berpendapat dan menyatakan keraguannya terhadap pendaugunaan *e-Government*. Pemerintah hanya menganggap konsep *e-Government* hanyalah semata-mata otomatisasi sistem, sehingga tidak mengubah cara kerja pemerintah/birokrasi. Oleh karena itu esensi dari tujuan penerapan

konsep *e-Government* tidak akan tercapai (Diakses dari: <http://www.komunikasipublik.multiply.com>, 2009).

TI sebagai sarana yang digunakan untuk implementasi *e-Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mempunyai berbagai masalah : (1) efisiensi dan produktivitas dalam pembelanjaan TI, (2) kurang jelasnya investasi TI, (3) kurangnya koordinasi proyek TI, sehingga terjadi tumpang tindih dan tingkat integrasi rendah, (4) hambatan dalam pengelolaan administrasi TI. Masalah lain adalah masalah kearsipan, dimana agar penerapan *e-Government* dapat efektif dan efisien serta transparan, maka masalah pendokumentasian harus diperbaiki, karena diperlukan satu *data-base* yang tersentral misalnya pembuatan KTP maka diperlukan identitas setiap warga negara (Soedjito, 2005).

Disamping masalah-masalah tersebut di atas, masalah infrastruktur belum memadai termasuk kurangnya tempat akses informasi merupakan tantangan dalam penerapan *e-Government*. Pelayanan melalui *e-Government* perlu didukung oleh akses internet di tempat-tempat pelayanan umum. Berdasarkan data dari Internet World Stats, 5 besar pengguna internet di ASEAN dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  
Pengguna Internet Beberapa Negara di ASEAN

Negara	Jumlah Penduduk	Thn 2000	Thn 2007	Penetrasi (% Populasi)
Singapura	3.654.103	1.200.000	2.421.800	66.30%
Malaysia	28.294.120	3.700.000	13.528.200	47.80%
Vietnam	85.262.356	200.000	18.2666.207	21,4%
Thailand	67.249.456	2.300.000	8.420.000	12.50%
Indonesia	234.693.997	2.000.000	20.000.000	8.90%

Sumber : Diakses dari <http://www.Internetworldstats.com>, 2009

Dari data tersebut di atas, dapat terlihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling besar, namun penetrasi jumlah pengguna internet bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga berada di peringkat paling bawah (8.90%). Tabel tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pengguna internet di Indonesia masih tertinggal jauh di banding dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN (<http://www.Internetworldstats.com>, 2009).

Sedangkan di Negara Eropa walaupun belum merata di semua Negara Eropa seperti Belanda, Swedia, dan Denmark, akses internet telah mencapai 60% dimana rata-rata akses internet rumah tangga di 15 negara Uni Eropa sekitar 40%. Pada tahun 2002 akses internet keseluruhan di Uni eropa telah mencapai 40,4 %. Pembangunan infrastruktur akses internet di negara Eropa ini telah berdampak pada kesuksesan implementasi *e-Government* di Eropa (Windraty, 2009: [www.garutkab.go.id](http://www.garutkab.go.id)).

### 5. Potret e-Government Pemerintah Daerah

Menteri Komunikasi dan Informasi cq. Asisten Deputi Media Baru, menyatakan bahwa, keberadaan situs web pemerintah daerah sudah sekitar 4-5 tahun yang lalu. Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menerbitkan Buku Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah pada bulan Agustus 2003. Jumlah situs web pemerintah daerah (Pemprov/Pemkab/Pemkot) yang tercatat pada Asisten Deputi Urusan Media Baru baru sebanyak 224 dari 470 jumlah Pemrop/Pemkab/Pemkot (48%). Selain itu terdapat sistus web pemerintah daerah dengan domain go.id tetapi tidak termasuk sebagai situs resmi pemerintah karena kepemilikannya adalah intern departemen dan pemerintah daerah (Diakses dari <http://www.depkominfo.go.id>, [blogs.depkominfo.go.id/](http://blogs.depkominfo.go.id/) kondisi-situs-web pemerintah daerah, tanggal 23/3/2009).

Tabel 2, 3, dan 4 memperlihatkan nama situs web beberapa pemerintah daerah di Indonesia.

**Tabel 2.**  
**Nama alamat situs web beberapa Pemerintah Provinsi**

Pemerintah Provinsi (Pemprov)	Alamat situs web
Riau	riau.go.id
Sumatera Selatan	pempropsumsel.go.id
Sumatera Utara	pempropsu.go.id
Jawa Tengah	jawatengah.go.id
Jawa Timur	jatim.go.id
Maluku	malukuprov.go.id
Di Yogyakarta	pemda-diy.go.id

**Tabel 3.**  
**Nama alamat situs web beberapa Pemerintah Kabupaten**

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)	Alamat situs web
Agam	kabupaten-agam.go.id
Bandung	kabbandung.go.id
Mandailing Natal	madina.go.id
Mojokerto	pemkab-mojokerto.go.id
Probolinggo	kabupatenprobolinggo.go.id
Gorontalo	kabgtlo.go.id
Tapanuli Utara	pemdataput.go.id
Toba Samosir	tobasamosir.go.id

**Tabel 4.**  
**Nama alamat situs web beberapa Pemerintah Kota**

Pemerintah Kota (Pemkot)	Alamat situs web
Tangerang	kotatangerang.go.id
Bandung	bandung.go.id
Malang	pemkot-malang.go.id
Yogyakarta	jogja.go.id

Sumber :Diakses 23/3/2019 dari <http://www.depkominfo.go.id> blogs.depkominfo.go.id/ kondisi-situs-web-pemerintah-daerah (diolah).

Menteri Komunikasi dan Informasi, (Mohammad Nuh) menyatakan, bahwa pada tahun 2010 seluruh pemerintah daerah baik pada tingkat Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia harus mengimplementasikan *e-Government*. Lebih jauh juga dikemukakan pemanfaatan jaringan telekomunikasi akan dilakukan secara bertahap di sejumlah Provinsi dan Kabupaten/kota pada tahun 2009. Diharapkan pada tahun 2010 seluruh daerah telah menggunakan jaringan telekomunikasi canggih (<http://www.wartaegov.com/index.php?option=com,200>).

Pada tahun 2004 telah dilaksanakan evaluasi terhadap seluruh situs *web* pemerintah daerah. Hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi c.q. Asisten Deputi Urusan Media Baru tersebut, bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan situs *web* Pemerintah Daerah antara lain:

- Tidak tersedianya anggaran operasional yang memadai.
- Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang sangat terbatas.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- Struktur organisasi pengelolaan yang belum memadai.

Beberapa contoh permasalahan dalam kepemilikan dan pengelolaan situs *web* pemerintah daerah seperti:

- Terdapat Pemda yang belum mempunyai *web* karena belum tersedianya jaringan internet.
- Pemda yang sudah memiliki situs *web* tetapi tidak dapat

dioperasikan karena ketidakjelasan siapa pengelola *web* tersebut, dan terputusnya jaringan karena tidak membayar sewa.

- Pemda yang sudah memiliki *web* tetapi tidak lancar pengoperasiannya karena tidak tersedianya dana operasional.

Selain itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Komputek (2005) menunjukkan bahwa tak berlebihan jika dikatakan masyarakat pengguna internet di Indonesia baru taraf pengenalan atau masih merupakan pasar yang baru muncul. Sebagian masyarakat masih menganggap pemakaian internet adalah kegiatan mewah atau mahal. Lebih jauh lagi bahwa sebagian besar masih menganggap penggunaan internet menjadi masalah (hampir 75%) karena mereka sering mengalami kesulitan akses, lama saat *browsing*, sering terputus dan bahkan tak jarang mengalami "hang" (Diakses tanggal 20/7/2009 dari <http://HYPERLINK> "<http://www.komputekonline.com>, 2009).

Mencermati uraian di atas dan memperhatikan kondisi yang ada, penerapan *e-Government* di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan khususnya bagi Pemerintah Daerah. Salah satu di antaranya adalah masalah sumberdaya manusia (SDM). Sumberdaya manusia di bidang TI belum memadai, dalam penerapan *e-Government* di kantor-kantor publik perlu didukung oleh pegawai yang mengerti dan menguasai mengenai TI. TI telah berkembang pesat, dan berubah secara cepat sehingga diperlukan kemauan belajar dan

mampu menanggapi perubahan. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa internet di Indonesia "baru dikenal" oleh masyarakat dan frekuensi pemakaiannya pun belum begitu banyak. Masalah lain adalah mengenai koneksi sistem informasi antar lembaga pemerintah atau antara pemerintah daerah, atau sesama pemerintah daerah itu sendiri. Selain itu, budaya berbagi (*sharing*) masih rendah dan kultur untuk mempermudah urusan belum ada, karena sebagian besar penduduk Indonesia masih menganggap bahwa internet adalah sesuatu yang mahal.

Agar mendapat keuntungan optimal maka koneksi antar lembaga pemerintah harus baik, sehingga ada kesesuaian dan keharmonisan dari setiap lembaga pemerintah yang menjalankan tugasnya dan perlu dukungan biaya pemeliharaan operasional yang memadai. Disamping itu, tentunya dalam hal pendayagunaan *e-Government* ini masih perlu kebijakan khusus yang lebih spesifik dari Pemerintah Pusat meskipun Pemerintah Daerah telah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, namun perlu pengaturan secara teknis dalam pendayagunaan *e-Government*. Hal ini penting agar pemerintah daerah memiliki standar *web* minimal dalam hal penerapan *e-Government* di daerah-daerah. Dengan pengaturan seperti ini, pemerintah juga harus terlebih dahulu merumuskan apa esensi

dan tujuan *e-Government* itu sendiri. Pemahaman-pemahaman umum tentu saja tidak serta merta diterapkan dalam praktek pemerintahan Indonesia khususnya di pemerintah daerah, karena butuh pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar penerapan *e-Government* tidak menjadi sia-sia.

Menurut Bastian (2008), berdasarkan survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara *online*, karena mereka lebih menyukai bentuk pelayanan tradisional yang berupa tatap muka langsung, surat menyurat atau telepon. Lebih jauh Bastian menggolongkan *e-Government* dalam empat tingkatan seperti terlihat pada Tabel 5.

Sebagian besar kantor pemerintahan di Indonesia berada pada tingkat pertama, yang hanya sebatas memberi informasi kepada masyarakat melalui *website*. Namun sebagian kecil kantor pemerintah sudah pada *level* kedua dan ketiga, yang diantaranya berupa Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP) yang telah dikembangkan oleh beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia. Sedangkan Singapura adalah salah satu contoh negara yang sudah sampai *level* keempat yang berupa interaksi antara masyarakat dan seluruh kantor pemerintahan (Bastian, 2008).

Tabel 5.  
Penggolongan e-Government

Level/Tingkatan	Fungsi
Tingkat Pertama	pemerintah mempublikasikan informasi melalui <i>website</i>
Tingkat Kedua	interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui <i>e-mail</i>
Tingkat Ketiga	masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik.
Tingkat keempat	integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah memiliki data base bersama.

Sumber: Bastian (2008), Diakses dari <http://www.bappenas.go.id>, (diolah).

**6. Indikator, Unsur-unsur dan Strategi Pendayagunaan e-Government untuk Mendukung Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Pemerintahan Daerah**

**a. Indikator dan Unsur-unsur dalam Good Governance**

Menurut (Ismail M.,1997), dalam Domai, 2009 memasuki abad 21 telah terjadi perubahan teknologi dan inovasi baru yang memberikan tantangan terhadap pemerintah, khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat . Dalam konteks era globalisasi ini, tidak saja dihadapkan pada perubahan struktur ekonomi dan sosial, tetapi juga pada perkembangan dan persaingan global yang cepat dan meningkat tajam. Perubahan-perubahan yang luar biasa tersebut didorong oleh perubahan teknologi dan inovasi baru yang disamping menciptakan pilihan-pilihan baru

juga memberikan tantangan terhadap pemerintah, khususnya dalam system pemerintahan yang semakin efektif, efisien dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Memasuki era globalisasi juga menuntut pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Secara luas, *governance* mengacu pada persamaan hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat yang dilayani dan dipertahankan. *Good governance* menunjuk pada proses pengelolaan yang luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik suatu negara dan pendayagunaan sumber sumber alam, keuangan, manusia menurut kepentingan semua pihak dan dalam cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip, keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas menurut Hoessein 2000 dalam Domai, 2009.

Menurut, Saiful, et.al., 2009, bahwa *good governance* merupakan sebuah konsep yang

akhir-akhir ini banyak diperkenalkan sebagai upaya merumuskan pemerintahan yang baik. Lebih jauh lagi menurut Saiful dan Utomo sebagaimana dinyatakan bahwa *good governance* mempunyai indikator-indikator sebagai berikut:

- Penjamin situasi keterbukaan (*transparency*).
- Pertanggungjawaban publik (*public accountability*) dan,
- Kontrol dalam proses ekonomi maupun politik.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling dikedepankan dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Secara umum *good governance* mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum (Karhi Nisjar 1997). Berikut ini dikemukakan penjelasan tentang unsur-unsur tersebut.

- Akuntabilitas: Tanggung gugat dari pengurusan, penyelenggaraan dari *governance* yang dilakukan lebih jauh diartikan sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkan.
- Transparansi: yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai perumusan kebijaksanaan dari pemerintah,

organisasi, badan usaha. Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka diketahui oleh umum.

- Keterbukaan: pemberian informasi secara terbuka, terbuka terhadap kritik yang merupakan partisipasi. Keterbukaan dapat meliputi bidang politik, ekonomi dan pemerintahan.
- Aturan hukum: keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha berdasarkan hukum jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijaksanaan publik yang ditempuh. Juga dalam sosial *economic transactions*. *Conflict resolution* berdasarkan hukum. Istitusi hukum yang bebas, dan kinerjanya yang terhormat (Bintoro, 2000 dalam Saiful, et.al, 2009).

Berdasarkan perihal tersebut di atas, menurut UNDP (1996), unsur-unsur dalam *good governance* sebagai berikut :

- *Participation*. Setiap warga-negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama

- hukum untuk hak azasi manusia.
- *Transparency.* Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.
  - *Responsiveness.* Lembaga-lembaga harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
  - *Consensus orientation.* *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
  - *Equity.* Semua warganegara, baik laki-laki maupun perempuan, meningkatkan atau menjaga dan mempunyai kesempatan untuk kesejahteraan mereka.
  - *Effectiveness and efficiency.* Proses dan lembaga dapat menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
  - *Accountability.* Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada public dan lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
  - *Strategic vision.* Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini (Domai, 2009).  
Selanjutnya, menurut Syaiful, et.al., 2009, dimanapun, pembangunan dengan kaidah *good governance*, ditujukan guna memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep dari pembangunan berkelanjutan ini merupakan respon atas berbagai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan yang memacu pertumbuhan dan tidak mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakannya.  
Prinsip-prinsip *good and clean governance* yang banyak diperbincangkan saat ini adalah:
    - Lembaga perwakilan (DPRD) yang mampu menjalankan fungsi kontrol dan penyaluran aspirasi masyarakat.
    - Sistem peradilan yang fair, mandiri dan profesional.
    - Birokrasi yang profesional, responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat; dan tatanan masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol terhadap negara. Intinya, *good and clean governance* yang juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekosistem dalam sistemnya tersebut akan

berfungsi sangat baik untuk menuju pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup bersama di daerah.

Konsep ini sendiri sebenarnya telah banyak dikembangkan oleh berbagai badan internasional. Secara umum, konsep *good governance* mengandung keterlibatan masyarakat sebagai pendorong pemerintah (jalur struktur) untuk lebih menghargai sekaligus menempatkan masyarakat sebagai subyek kebijakan, bukan hanya obyek yang bisa diatur kemana arah kebijakan dirumuskan. Konsep *good governance* yang dirumuskan oleh negara-negara maju tidak sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia. Tentunya, konsep *good governance* ini harus dipadankan dengan situasi di Indonesia agar sesuai dengan kondisi yang ada.

#### **b. Strategi Pendayagunaan e-Government**

Untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi pemerintahan Indonesia khususnya pemerintahan daerah. Di bawah ini dapat diuraikan berapa strategi pendayagunaan *e-Government* untuk mendukung pelaksanaan *good governance* di Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- Penerapan *e-Government* perlu didukung dengan Kebijakan Pemerintah; Dalam hal penerapan *e-Government* ini masih perlu pengaturan dari pusat walaupun kewenangan tetap di daerah-daerah, karena walaupun daerah telah mempunyai kewenangan untuk

mengatur daerahnya sendiri, namun perlu pengaturan secara teknisnya. Misalnya pengaturan berupa standar minimal dalam hal penerapan *e-Government* di daerah-daerah dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam penerapan *e-Government*. Hal ini penting agar stabilitas tetap terjaga tidak menimbulkan perpecahan antar daerah karena persaingan dalam penerapannya. Tentu saja dalam pengaturan ini pemerintah juga harus terlebih dahulu merumuskan apa esensi dan tujuan *e-Government* itu sendiri.

Pemahaman-pemahaman umum tentu saja tidak serta merta diterapkan dalam praktek pemerintahan di Indonesia, karena butuh pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan agar penerapan *e-Government* tidak menjadi sia-sia. Diperlukan aturan main yang jelas antara instansi pengelola *e-Government* dengan instansi lain yang memerlukan jaringan informasi dan aplikasi sistem informasi, yang diperkuat oleh aturan atau keputusan kepala daerah. Pengembangan jaringan infrastruktur di lingkungan internal pemerintah daerah perlu dilakukan agar tercapai integrasi sistem informasi yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan *good governance*.

- Pembangunan infrastruktur yang memadai; Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah masih belum tersedia saluran telepon. Untuk itu perlu pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Jumlah tempat akses informasi masih sangat terbatas, untuk itu di daerah-daerah perlu perluasan tempat-tempat akses informasi. Masalah belum memadainya tempat akses informasi ini merupakan tantangan dalam penerapan *e-Government*. Pelayanan melalui *e-Government* perlu didukung oleh akses internet di tempat-tempat pelayanan umum. Pembangunan aplikasi *e-Government* sebagai informasi yang terintegrasi akan dapat mendukung pengambilan keputusan atau kebijakan pimpinan daerah. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan atau *workshop* tentang TI sebagai sarana untuk memperkenalkan teknologi informasi kepada aparatur pemerintah di semua tingkatan atau *level* sebagai sarana sosialisasi bagi para pengguna aplikasi di lingkungan pemerintahan daerah.

## 7. Penutup

Pendayagunaan *e-Government* dalam institusi pemerintahan sangat penting karena dapat mempermudah hubungan antar pemerintah baik pemerintah pusat dengan daerah maupun antar pemerintah daerah serta

meningkatkan interaksi pemerintah dengan masyarakat yang dilayaninya. Pendayagunaan *e-Government* ini sudah menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Saat ini, pendayagunaan *e-Government* sebagai sarana pelayanan publik pada instansi pemerintah di Indonesia masih terbatas. Sebagian besar instansi pemerintah pusat dan daerah hanya membangun *website* yang sebatas memberikan informasi kepada masyarakat. Hanya sebagian kecil saja yang sudah pada *level* kedua dan ketiga, yang diantaranya berupa Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP).

Agar pelaksanaan *e-Government* dapat berperan dengan baik maka jaringan informasi perlu ditingkatkan dan didayagunakan secara optimal. Selain itu sosialisasi nilai guna TI yang sangat besar harus dimanfaatkan dengan baik dan terus dilakukan di institusi pemerintah daerah. Selain itu, pembenahan aturan main antara instansi pengelola *e-Government* dengan instansi lain yang memerlukan jaringan informasi dan aplikasi sistem informasi, perlu didukung dan diperkuat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan jaringan infrastruktur di lingkungan internal pemerintah daerah agar tercapai integrasi sistem informasi yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Hal lain yang juga penting

adalah penyelenggaraan *workshop* sebagai sarana untuk memperkenalkan teknologi informasi kepada aparatur pemerintah di semua tingkatan sebagai sarana sosialisasi serta pendidikan dan latihan bagi para pengguna aplikasi di lingkungan pemerintahan daerah. Disamping itu, pengembangan aplikasi *e-Government* sebagai informasi yang terintegrasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan atau kebijakan Pemerintah Daerah. Lebih luas lagi dari itu, pengembangan *e-Government* tersebut, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan informasi antar pusat dan daerah dan teknologi ini diharapkan mampu mendorong aliran informasi lain baik media cetak maupun elektronik untuk pemerataan informasi ke seluruh nusantara.

*Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien dan akuntabel dengan menjaga kesinergisan interaksi antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. *Good governance* melebihi ruang lingkup *e-Government*. *E-government* didefinisikan sebagai penyampaian layanan dan informasi dari Pemerintah kepada publik dengan menggunakan sarana elektronik. Pendayagunaan *e-Government*, merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan unsur transparansi, efisiensi dan efektifitas.

Dengan demikian, *e-Government* sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). *E-Government* juga mencerminkan

nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang menjadi tanggungjawab setiap aparatur pemerintahan di pusat dan daerah.

#### 8. Daftar Pustaka

- Anonim, *Goechi.com*, 2009. *E-Government* Indonesia. Diakses tanggal 19 Maret 2009, dari <http://www.goechi.com/egovernment.html/>
- Anonim, *Internet World Stats.com*, 2009. Diakses tanggal 20 Juli 2009 dari <http://www.internetworldstats.com/stat3.htm>.
- Bastian, Sinar Harapan, 2003. *Perkembangan e-Government di Indonesia*. Diakses tanggal 19 Maret 2009 dari <http://www.bappenas.go.id/index.php/module=FileManagerfunc=download&puthexf=contentExpress/&www.bappenas.go.id://www.bappenas.go.id>
- Domai, Tjahjanulin, 2001. *Dari Pemerintahan ke Pemerintahan yang Baik*. Diakses tanggal 20/3/2009 dari <http://www.akademik.unsri.ac.id/.../6Dari%20Pemerintahan%20ke%20Pemerintahan%20yang%20Baik>.
- Dhillon, Gurjit, 2008. *Moving from E-Government to T-Government: A Study of Process Reengineering Challenges in UK Local Authority Context*, IGI Publishing, Brunel University, UK.
- Effendi, Sofian, 2005. *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*, Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi, Kantor Menteri Negara PAN.
- Nisjar, Karhi, 1997. *Beberapa Catatan tentang Good Governance*. Dalam *Jurnal*

- Administrasi dan Pembangunan, vol.1, no.1
- Rahardjo, Budi, 2001. *Membangun E-Government*, PPAU Mikroelektronika, ITB.
- Setiawati, Wenny, 2009. Penerapan *E-Government* di Indonesia. Diakses dari <http://www.pemantauperadilan.com/opini/67/PENERAPAN%20E-governmen.pdf>
- Soedjito, Bambang Bintoro, 2005. Peran dan Strategi Manajemen Teknologi Informasi Dalam Membangun Industri dan Bisnis Dalam Era Globalisasi.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Diakses tanggal 12 Nopember 2009 dari: <http://www.2Good%20Governance%20Paradigma%20Baru%20Manajemen%20Pembangunan>.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
- Saiful, Arif, et.al., 2001. *Good Governance* Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Diakses tanggal 21/12/2009 dari <http://www.google.co.id/#hl=id&q=Arif+Syaiful%2C+Good+Governance>
- UNDP, 1997. *Governance for Sustainable Human Development A UNDP Policy Document*. Diakses dari <http://mirror.undp.org/magnet/policy/chapter1.htm>, tanggal 31 Juli 2009
- Wigrantoro, Mas, 2004. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penerapan *Good Governance* di Indonesia.
- Windraty, 2005. *E-Government Pelayanan Publik Yang Lebih Baik*. Diakses dari <http://www.garutkab.go.id/.../e-Goverment%20menuju%20pelayanan.doc>
- Tim Komputek, 2005. Diakses tanggal 20/7/2009 dari <http://www.komputekonline.com>